



BUPATI MERANGIN

Bangka, 15 Mei 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Merangin

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : SE 900/ 27 /TAPD/2020

TENTANG

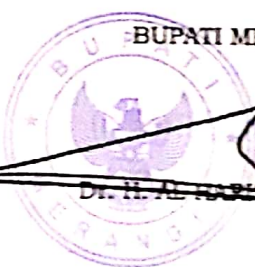

PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENGAMANAN
DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Kabupaten Merangin telah melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Penyesuaian pendapatan tersebut diatas berimplikasi terhadap penyesuaian belanja daerah sehingga harus dilakukannya rasionalisasi belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada seluruh perangkat daerah. Maka dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor SE 900/19/TAPD/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperintah kepada Saudara untuk:

- 1) Melakukan kembali penyesuaian anggaran belanja langsung dengan besaran sebagaimana tercantum lampiran dalam surat edaran ini.
- 2) Penyesuaian belanja sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas melalui pengurangan belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada program dan kegiatan yang bersumber dari dana umum dan dana transfer khusus dari pemerintah pusat.
- 3) Pengurangan belanja barang dan jasa sebagaimana poin 2 diatas terutama dilakukan untuk:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - b. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - c. Cetak dan penggandaan;
 - d. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Perawatan kendaraan bermotor;


- g. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - h. Sewa sarana mobilitas;
 - i. Sewa alat berat;
 - j. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan media cetak, dan peralatan;
 - k. Jasa konsultansi;
 - l. Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - m. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - n. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau
 - o. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
- 4) Pengurangan belanja modal sebagaimana poin 2 diatas terutama dilakukan untuk:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Pengadaan mesin dan alat berat;
 - c. Pengadaan tanah;
 - d. Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - e. Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - f. Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.
- 5) Perangkat daerah dilarang melakukan pengurangan belanja operasional rutin kantor antara lain seperti belanja air, listrik, dan telepon, serta belanja gaji pegawai kontrak. Apabila terjadi pengurangan yang mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan belanja operasional tersebut sampai dengan akhir tahun, maka sepenuhnya akan menjadi **tanggung jawab pengguna anggaran**.
- 6) Pengurangan belanja sebagaimana dimaksud pada poin-poin diatas di-entry kedalam aplikasi SIMDA Keuangan, dan hasil *printout* DPPA yang telah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah cq. Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Merangin paling lambat tanggal 18 Mei 2020.
- 7) Dalam proses pengurangan belanja, sub bagian perencanaan agar berkoordinasi dengan sub bagian keuangan pada masing-masing perangkat daerah agar tidak terjadi kesalahan pengurangan pada belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang telah terealisasi.
- 8) Perangkat daerah yang telah menyelesaikan pengurangan belanja sesuai ketentuan dapat kembali melakukan proses pengajuan pencairan anggaran melalui mekanisme GU/TU/LS dengan mempedomani sisa anggaran yang tersedia dan ketentuan yang berlaku.
- Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


 BUPATI MERANGIN,

 Dr. H. AL HAFID S. Sca, M.H.

Lampiran : Surat Edaran Bupati
 Nomor : SE 900/2020 /TAPD/2020
 Tanggal : 15 Mei 2020

NO	SKPD	TOTAL PAGU AWAL 2020	RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG								JUMLAH BELANJA LANGSUNG SETELAH RASIONALISASI	
			DANA RP	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DANA KELURAHAN	BELANJA SUMBER PAD	DANA UMUM				JUMLAH
								SE 900/19/TAPD/2020	SE 900/20/TAPD/2020			
									BELANJA BARANG DAN JASA/BELANJA MODAL	BELANJA MANDATORY INFRASTRUKTUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (4 + ... + 11)	13 = (3 - 12)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	99.235.628.425,50						(1.500.000.000,00)	(3.727.041.836,38)	(1.876.788.450,00)	(7.103.830.286,38)	92.131.798.139,12
2	DINAS KESEHATAN	83.678.854.111,99						(1.035.323.654,81)	(56.731.973,60)	(1.207.261.463,00)	(2.299.317.091,41)	81.379.537.020,58
3	BSUD KOL. ABUNDJANI	55.560.480.000,00					(12.176.500.000,00)	(204.948.500,00)	-	-	(12.381.448.500,00)	43.379.032.500,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	391.433.757.015,47		(13.973.187.000,00)				(739.412.400,00)	(9.390.642.415,40)	(77.607.459.507,74)	(101.710.701.323,14)	289.723.055.692,34
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.175.620.000,00						(564.082.420,00)	(725.381.818,55)	(1.767.397.900,00)	(3.056.862.138,55)	6.118.757.861,45
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.790.632.500,00						(218.263.250,00)	(1.081.288.562,35)	-	(1.299.551.812,35)	5.491.080.687,65
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.185.819.000,00						(287.621.900,00)	(503.922.022,22)	(154.800.000,00)	(946.343.922,22)	2.239.475.077,78
8	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNG ANAK	2.733.075.000,00						(273.307.500,00)	(1.606.344.779,08)	-	(1.879.652.279,08)	853.422.720,92
9	BAHAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.400.000.000,00	12.475.111.000,00					(240.000.000,00)	(394.310.438,79)	(500.000.000,00)	(11.340.800.561,21)	14.740.800.561,21
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.355.000.000,00						(135.500.000,00)	(576.902.130,53)	-	(712.402.130,53)	642.597.869,47
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.232.412.243,00		(111.294.000,00)				(412.934.424,30)	(1.301.435.228,66)	-	(1.825.663.652,96)	7.406.748.590,02
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.580.548.000,00						(62.500.000,00)	(293.421.789,87)	-	(355.921.789,87)	2.224.626.210,13
13	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.030.000.000,00						(403.000.000,00)	(2.407.434.746,09)	-	(2.810.434.746,09)	1.219.565.253,91
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.787.208.000,00			(69.120.000,00)			(122.500.000,00)	(152.069.465,51)	-	(343.689.465,51)	8.443.518.534,49
15	DINAS PERHUBUNGAN	2.540.000.000,00						(100.000.000,00)	(454.393.000,00)	-	(554.393.000,00)	1.985.607.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.950.000.000,00						(120.000.000,00)	(616.562.744,74)	(250.000.000,00)	(986.562.744,74)	963.437.255,26
17	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PEKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	6.892.007.000,00		(3.942.007.000,00)				(145.000.000,00)	(755.766.480,77)	(750.000.000,00)	(5.592.773.480,77)	1.299.233.519,23
18	DINAS PERANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2.273.779.000,00						(227.377.900,00)	(1.070.407.427,60)	-	(1.297.785.327,60)	975.993.672,40
19	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	13.044.075.000,00		(3.498.756.000,00)	(440.954.000,00)			(267.589.000,00)	(1.321.178.875,39)	(3.042.212.500,00)	(8.570.690.375,39)	4.473.384.624,61
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.000.000.000,00						(100.000.000,00)	(554.178.296,67)	-	(654.178.296,67)	345.821.703,33
21	DINAS PERIKANAN	3.261.765.000,00		(1.261.765.000,00)				(100.000.000,00)	(317.926.620,95)	(500.000.000,00)	(2.179.691.620,95)	1.082.073.379,05
22	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9.037.026.322,94		(2.331.516.000,00)				(477.814.200,00)	(1.463.521.085,41)	(575.000.000,00)	(4.847.851.285,41)	4.189.175.037,53
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNGAN	6.229.385.057,50						(346.037.000,00)	(1.257.069.786,03)	(1.356.000.000,00)	(2.959.106.786,03)	3.270.278.271,47
24	SEKRETARIAT DAERAH	30.596.351.000,00						(3.885.125.100,00)	(13.936.020.158,50)	-	(17.821.145.258,50)	12.775.205.741,50
25	SEKRETARIAT DPRD	18.200.000.000,00						(700.000.000,00)	(9.369.551.250,00)	-	(10.069.551.250,00)	8.130.448.750,00
26	HALUAN KERATUAN RAMOHA DAN POLITIK	1.750.000.000,00						(175.000.000,00)	(664.871.894,89)	-	(839.871.894,89)	910.128.105,11
27	KANTOR C. AMAT BANGKAL	5.994.640.000,00				(2.014.154.800,00)		(135.000.000,00)	(620.280.945,10)	-	(2.769.435.745,10)	3.225.204.254,90
28	KANTOR C. AMAT TAMBOR	7.205.800.000,00				(2.517.693.500,00)		(140.000.000,00)	(630.690.135,46)	-	(3.288.383.635,46)	3.917.416.364,54
29	KANTOR C. AMAT BUNJAL MABAI	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(306.082.483,93)	-	(366.082.483,93)	233.917.516,07
30	KANTOR C. AMAT PAMERANG	2.011.160.000,00				(503.538.700,00)		(60.000.000,00)	(467.575.305,55)	-	(1.056.114.005,55)	955.045.994,45
31	KANTOR C. AMAT MUSA BAI	630.000.000,00						(63.000.000,00)	(265.723.367,70)	-	(328.723.367,70)	301.276.632,30
32	KANTOR C. AMAT JAMPAT	640.000.000,00						(64.000.000,00)	(387.859.154,00)	-	(451.859.154,00)	188.140.846,00
33	KANTOR C. AMAT TAMBOR ULU	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(288.349.142,23)	-	(348.349.142,23)	251.650.857,77
34	KANTOR C. AMAT TAMBOR BELATAN	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(286.783.115,84)	-	(346.783.115,84)	253.216.884,17
35	KANTOR C. AMAT LEMAH MABURAI	630.000.000,00						(63.000.000,00)	(362.683.022,78)	-	(425.683.022,78)	204.316.977,22
36	KANTOR C. AMAT BANGKAL BARAT	578.000.000,00						(57.800.000,00)	(303.956.670,44)	-	(361.756.670,44)	216.243.329,56
37	KANTOR C. AMAT BANGKAL MABURAI	575.000.000,00						(57.500.000,00)	(262.679.041,00)	-	(320.179.041,00)	254.820.959,00
38	KANTOR C. AMAT HALU TAMBOR	585.000.000,00						(58.500.000,00)	(289.401.540,71)	-	(347.901.540,71)	237.098.459,29
39	KANTOR C. AMAT TAMBOR ULU	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(328.705.162,10)	-	(388.705.162,10)	211.294.837,90
40	KANTOR C. AMAT TAMBOR TAMBOR	620.000.000,00						(62.000.000,00)	(262.347.863,01)	-	(324.347.863,01)	295.652.136,99
41	KANTOR C. AMAT BUNJAL MABURAI	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(251.411.601,40)	-	(311.411.601,40)	288.588.398,60
42	KANTOR C. AMAT BANGKAL BARAT	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(333.824.539,80)	-	(393.824.539,80)	206.175.460,20

NO	BKPD	TOTAL PAGU AWAL 2020	RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG										JUMLAH	JUMLAH BELANJA LANGSUNG SETELAH RASIONALISASI
			DANA BR	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DANA KELURAHAN	BELANJA SUMBER PAD	DANA UMUM						
								SE 900/19/TAPD/2020	SE 900/ /TAPD/2020					
									BELANJA BARANG DAN JASA/BELANJA MODAL	BELANJA MANDATORY INFRASTRUKTUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	13 = (12 - 12)		
43	KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR	645.000.000,00						(64.500.000,00)	(361.349.118,73)	-	(425.849.118,73)	219.150.881,27		
44	KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(313.343.624,34)	-	(373.343.624,34)	226.656.375,66		
45	KANTOR CAMAT BENAH PAMENANG	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(334.451.216,08)	-	(394.451.216,08)	205.548.783,92		
46	KANTOR CAMAT TAREH LINTAS	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(308.471.030,93)	-	(368.471.030,93)	231.528.969,07		
47	KANTOR CAMAT TAREH BARAT	650.000.000,00						(65.000.000,00)	(303.515.037,20)	-	(368.515.037,20)	281.484.962,80		
48	KANTOR CAMAT PAMENANG BELATAN	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(311.621.159,25)	-	(371.621.159,25)	228.378.840,75		
49	KANTOR CAMAT MANDU TAREH	950.000.000,00						(410.000.000,00)	(301.618.551,09)	-	(711.618.551,09)	238.381.448,91		
50	KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG	600.000.000,00						(60.000.000,00)	(307.359.769,90)	-	(367.359.769,90)	232.640.230,10		
51	INSPEKTORAT DAERAH	5.700.000.000,00						(570.000.000,00)	(3.616.146.852,14)	-	(4.186.146.852,14)	1.513.853.147,86		
52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.680.000.000,00						(668.000.000,00)	(3.927.944.382,00)	-	(4.595.944.382,00)	2.084.055.618,00		
53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	9.161.000.000,00						(275.100.000,00)	(4.748.678.325,63)	-	(5.023.778.325,63)	4.137.221.674,37		
54	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	4.020.000.000,00						(402.000.000,00)	(1.392.889.614,99)	-	(1.794.889.614,99)	2.225.110.385,01		
55	BADAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.747.761.000,00						(574.776.100,00)	(2.133.979.493,95)	-	(2.708.755.593,95)	3.039.005.406,05		
56	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.200.000.000,00						(120.000.000,00)	(618.508.132,73)	-	(738.508.132,73)	461.491.867,27		
JUMLAH		838.776.784.676,40	12.475.111.000,00	(25.118.525.000,00)	(510.074.000,00)	(5.035.387.000,00)	(12.176.500.000,00)	(17.438.513.349,11)	(78.626.624.428,00)	(89.586.919.820,74)	(216.017.432.597,85)	622.759.352.078,55		


 BUPATI MERANGIN
 Dr. H. AL HANIS S. S., M.H.